

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama dilakukan oleh Ni Made Yusmini (2019) dengan judul “Efektivitas dan Dampak Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Terhadap Pendapatan dan Kesempatan Kerja Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa Sangeh Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung”. Metode penelitian menggunakan metode yakni kuantitatif, cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah dengan memberikan kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang perlu di jawab oleh responden. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program KUBE di Desa Sangeh Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung, serta untuk mengetahui dampak program terhadap peningkatan pendapatan keluarga dan peluang kerja. Berdasarkan penelitian tersebut kesimpulan yang dapat diperoleh adalah tingkat efektivitas program KUBE di Desa Sangeh Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung adalah sangat efektif. Hal itu ditunjukkan dimana pendapatan rata-rata perbulan sebelum dan sesudah mengikuti program KUBE terdapat peningkatan yang signifikan yakni dari Rp. 304.800 dan meningkat menjadi Rp. 493.800. Selain itu juga terdapat peningkatan kesempatan kerja rata-rata perminggu dari 36,3 jam meningkat menjadi 42,5 jam.

Penelitian kedua dilakukan oleh Yuni C. W., Nurul U. A., dan Roni P. W. (2019), dengan judul “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian ini digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan hasil penelitian berdasarkan data-data yang diperoleh. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi Kelompok Usaha Bersama binaan dari Kemensos dan Dinas Sosial, Peran seta pemerintah Kota Probolinggo dalam penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan kesimpulan yang dapat dihasilkan adalah program KUBE yang telah

diimplementasikan di wilayah Kota Probolinggo sejak tahun 2016 menjadi salah satu faktor keberhasilan program pengentasan kemiskinan di Kelurahan Pakistaji Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo.

Penelitian ketiga ini berjudul “Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Kurang Mampu melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Desa Langko, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat” ini dilakukan oleh Baiq S. A., dan Agustina A. (2020). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebagai program pemberdayaan masyarakat di Desa Langko, Lombok Barat. Hal ini dikarenakan Desa Langko, Lombok Barat merupakan wilayah yang kaya akan potensi usaha dari berbagai sektor seperti, sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kerajinan, dan pengolahan pangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat terbentuk 5 KUBE yang telah siap mengajukan proposal kepada pihak dinas sosial terkait. Dengan demikian pembentukan KUBE di Desa Langko, Lombok Barat telah dilakukan secara efektif, dimana para anggota KUBE merasakan manfaatnya seperti meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan para anggotanya.

Penelitian keempat ini dilakukan oleh Silvia dan Sujianto (2021) dengan judul “Efektivitas Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti”. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan membawa dampak perubahan terhadap peningkatan kesejahteraan sosial bagi para anggota kelompok KUBE. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif agar penelitian yang dilakukan dapat menggambarkan secara jelas bagaimana kondisi dilapangan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh hasil bahwa Efektivitas Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Meranti masih kurang efektif dan belum maksimal dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan masih ditemukan faktor penghambat seperti konflik antar anggota, kurangnya keterampilan SDM, dan persaingan yang tidak sehat.

Penelitian kelima ini berjudul “Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama di Kota Malang” dilakukan oleh Rizqi I., Afifudin, Hirshir A. (2022). Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dan data dikumpulkan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi agar hasil penelitian dapat menjelaskan kondisi subyek penelitian secara menyeluruh. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang efektivitas seras faktor penghambat dari pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kota Malang. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa secara umum pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat miskin melalui KUBE di Kota Malang bisa dikatakan cukup efektif. Hasil ini ditunjukkan dari 4 indikator yang menjadi acuan ukuran efektivitas seperti Ketepatan sasaran, sosialisasi program, pencapaian tujuan, dan pemantauan program, hanya 2 indikator (Ketepatan sasaran, dan Pencapaian tujuan) yang efektif, sedangkan 2 indikator (Sosialisai program, dan Pemantauan program) lainnya kurang efektif.

Penelitian keenam ini berjudul “Implementasi Kebijakan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Menangani Kemiskinan Oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur” dilakukan oleh Tsani S. F., dan Muhammad Agus, M. (2024). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan teori implementasi dari George C. Edward III. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses berjalannya kebijakan bantuan sosial Kelompok Usaha Bersama dalam mengatasi kemiskinan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh hasil bahwa dalam pengimplementasian Program Kelompok Usaha Bersama telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan teori George Edward III, namun masih terdapat beberapa kendala seperti adanya anggota KUBE yang tidak memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan, sehingga implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tidak dapat tersalurkan. Selain itu dikarenakan program ini dilakukan

dengan cara berkelompok sehingga terdapat kekurangan dan kendala dalam pengelolaannya, namun kendala tersebut dapat teratasi apabila seluruh pihak yang terkait berusaha semaksimal mungkin mengambil peran dalam pengimplementasian guna melancarkan Program Kelompok Usaha Bersama.

Penelitian ketujuh ini berjudul “Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kewirausahaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintan” dilakukan oleh Dinda A., Andi K. L., dan Lilis S. (2024). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menggunakan teori efektivitas oleh Budiani. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis bagaimana efektivitas pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kelurahan Sungai Lekop Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh hasil bahwa efektivitas pemberdayaan masyarakat melalui program kewirausahaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kelurahan Sungai Lekop dapat dikatakan baik, karena dari keempat indikator yang sudah dipaparkan sebagian sudah berjalan dengan baik meskipun ada beberapa hambatan seperti kurangnya sumber daya manusianya baik dari pihak Dinas Sosial maupun masyarakat sebagai anggota, sulitnya mendapatkan sertifikasi halal dan memenuhi syarat BPOM sebelum dijual, dan lain sebagainya.

Penelitian kedelapan ini dilakukan oleh Wilya Achmad (2022) melakukan penelitian dengan judul “*Implementation of the Joint Business Group (KUBE) Program in Poverty Alleviation in Sumedang District*”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif agar lebih memahami hasil penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebagai upaya pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Sumedang dengan berfokus pada fungsi penting fasilitator. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) memerlukan fasilitator untuk mendampingi pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Sumedang. Namun pada kenyataannya program pendampingan Kelompok

Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Sumedang masih menemui hambatan yang berkaitan dengan waktu, fasilitas, dan kompetensi pendamping. Karna hal ini implementasi program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Sumedang tidak berjalan dengan baik. Sehingga untuk kedepannya diharapkan pemerintah Kabupaten Sumedang melakukan kegiatan analisis kebijakan demi terselenggaranya kesejahteraan sosial.

Penelitian kesembilan ini dilakukan oleh Joyakin, T. (2023) dengan judul “*Joint Business Group (KUBE) Program Implementation as a Predictor of Community Welfare: The Poverty Reduction Efforts in Indonesia*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana data yang dikumpulkan diperoleh dari hasil survei yang melibatkan 537 keluarga dari 15 desa yang berada di Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak langsung pelaksanaan Program KUBE terhadap kesejahteraan masyarakat, selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi peran akuntabilitas pengelolaan dana dalam memfasilitasi pelaksanaan Program KUBE dan dampaknya terhadap masyarakat. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh positif yang besar dari pelaksanaan KUBE yang adil dan transparan terhadap pengembangan dan penyempurnaan keterampilan masyarakat terutamanya pada masyarakat kurang beruntung, yang selanjutnya memberi kontribusi secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dapat mengentaskan masyarakat dari kemiskinan secara efektif.

Penelitian kesepuluh ini berjudul “*Analysis of The Implementation of Community Empowerment Policies in Denpasar, Bali, Indonesia*” dilakukan oleh I Made S., Azhari Aziz S., dan I Kadek D. J. (2024). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis, hal ini untuk mengeksplorasi kebijakan pemberdayaan masyarakat di Denpasar dengan fokus pada penurunan jumlah kelompok KUBE dari 33 kelompok menjadi 23 kelompok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) oleh Pemerintah Kota Denpasar melalui bantuan tunai. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat

disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya terdapat berbagai permasalahan di lapangan, hal ini menyebabkan program KUBE tidak berjalan efektif karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana, modal pembangunan yang kecil, serta belum adanya pemasaran akhir produk industri rumah tangga. Hal tersebut akhirnya menjadi salah satu penyebab tingginya angka kemiskinan di desa. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka Pemerintah diharapkan dapat memberikan modal yang lebih besar, membuat jaringan pemasaran produk industri rumah tangga, melatih kelompok masyarakat, serta memberikan pendampingan teknis di lapangan.

B. Kajian Teori

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan proses yang rumit dan kompleks, selain itu implementasi kebijakan juga tahapan yang sangat penting dalam proses pelaksanaan kebijakan, hal ini dikarenakan implementasi kebijakan dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Implementasi kebijakan akan dilaksanakan apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, kemudian program kegiatan juga harus tersusun dan dana telah siap untuk disalurkan, sehingga dapat mencapai sasaran atau tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

Implementasi kebijakan merupakan penghubung antara tujuan kebijakan dan realisasi hasil kegiatan pemerintah. Hal ini sejalan dengan pandangan Van Meter dan Van Horn (Grindle, 2017) yang menyatakan bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (*policy stakeholders*).

Teori implementasi kebijakan dapat dilihat dari beberapa perspektif, salah satu adalah teori implemementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III. Menurut Edward III, implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan apabila

tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya, maka tujuan dari kebijakan tersebut tidak dapat terwujud. Oleh sebab itu, maka untuk mencapai tujuan kebijakan, setidaknya ada empat indikator yang harus diperhatikan dalam mendukung keberhasilan proses pelaksanaan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Komunikasi merupakan faktor yang sangat penting, hal ini dikarenakan komunikasi adalah proses penyampaian informasi kebijakan oleh pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Dalam komunikasi ini, terdapat beberapa dimensi yaitu penyampaian informasi, kejelasan, dan konsistensi. Penyampaian informasi artinya kebijakan ini tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan, akan tetapi juga disampaikan kepada kelompok yang akan menjadi sasaran kebijakan. Kejelasan artinya kebijakan yang disampaikan kepada para pelaksana dan kelompok sasaran harus diterima dengan jelas, sehingga paham akan maksud dan tujuan dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Konsistensi artinya perintah yang diberikan harus konsisten dan jelas, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik.

Yang kedua adalah sumber daya. Dalam hal ini, sumber daya terdiri dari staf pelaksana, sarana dan prasarana, informasi dan kewenangan. Staf pelaksana adalah aparatur yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan, oleh sebab itu, maka jumlah sumber daya manusia yang dimiliki harus cukup dan memiliki kemampuan dan keterampilan yang mumpuni. Lalu sarana dan prasarana, hal ini juga tidak kalah penting karena keberhasilan suatu kebijakan harus didukung dengan sarana dan prasarana yang lengkap dan juga memadai. Selanjutnya informasi, hal ini berkaitan dengan petunjuk, pedoman ataupun tata cara yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Terakhir adalah kewenangan, hal ini berkaitan dengan apa yang telah diperintahkan dan juga diamanatkan dalam pelaksanaan kebijakan, artinya staf pelaksana harus menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangan dan kebijakan yang telah ditentukan.

Selanjutnya adalah disposisi atau sikap. Dalam hal ini, disposisi terdiri dari pengangkatan birokrasi dan insentif. Pengangkatan birokrasi adalah pengangkatan atau pemilihan staf pelaksana yang terdiri dari orang-orang yang memiliki dedikasi tinggi terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan. Sedangkan insentif adalah salah satu cara yang diharapkan dapat mengatasi masalah sikap dari para staf pelaksana, hal ini dapat dilakukan dengan memberikan penghargaan baik berupa uang ataupun yang lainnya.

Terakhir adalah struktur birokrasi, Dalam hal ini, struktur birokrasi terdiri dari *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. SOP adalah pedoman bagi para staf pelaksana dalam melaksanakan tugas atau kebijakan, sehingga dapat berjalan dengan baik. Sedangkan fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dengan melibatkan unit diluar organisasi. Hal ini dimaksudkan agar tidak adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan kebijakan, untuk mencapai itu, maka dibutuhkan koordinasi yang intensif.

2. Efektivitas Program

Efektivitas program merupakan elemen paling penting dalam suatu program atau kebijakan, hal ini dikarenakan efektivitas program dapat menilai dan mengukur sejauh mana keberhasilan capaian atau sasaran dari kegiatan dalam suatu program atau kebijakan yang telah direncanakan sebelumnya. Menurut (Budiani, 2009) efektivitas program adalah kesesuaian antara *output* dengan tujuan yang telah ditetapkan. Demikian pula menurut Barnard (Gibson, Ivancevich, 1997) efektivitas adalah tercapainya sasaran yang telah disepakati bersama. Sedangkan menurut (Schermerhorn, 2006) efektivitas merupakan suatu ukuran tentang pencapaian suatu tugas atau tujuan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu penilaian terhadap sasaran atau tujuan yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Hal ini juga sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh H. Emerson (Handyaningrat, 1988) menyatakan

bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran ataupun tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam upaya untuk menilai dan mengukur sejauh mana keberhasilan capaian atau sasaran yang telah dicapai, maka diperlukan pengukuran efektivitas program. Menurut (Siagian, 2016) pengukuran efektivitas program dapat dilakukan dengan beberapa kriteria atau ukuran seperti berikut:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai dimaksudkan agar dalam pelaksanaan tugasnya, karyawan dapat mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan adalah hal yang telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan agar para pelaksana tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap adalah hal yang berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai serta strategi yang telah ditetapkan, itu artinya kebijakan harus mampu menjembatani antara tujuan dengan usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
4. Perencanaan yang matang adalah memutuskan apa yang dikerjakan sekarang untuk organisasi dimasa depan.
5. Penyusunan program yang tepat terhadap suatu rencana yang baik diperlukan penjabaran dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, maka para pelaksana akan kurang memiliki pedoman dalam bertindak dan bekerja.
6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja merupakan salah satu indikator dalam efektivitas organisasi agar kemampuan bekerja produktif. Dengan sarana dan prasarana yang telah tersedia atau disediakan oleh organisasi.
7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu apapun program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan

efisien, maka organisasi tersebut tidak akan dapat mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi akan semakin didekatkan pada tujuannya.

8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik dan mengingatkan sifat manusia yang tidak sempurna, maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Adapun menurut (Sutrisno, 2010) terdapat lima indikator untuk mengukur efektivitas program, yaitu sebagai berikut:

1. Pemahaman program merupakan indikator untuk mengetahui sejauh mana program yang telah direalisasikan dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat yang menjadi sasaran program, hal ini mencakup mengenai proses sosialisasi yang dilakukan oleh staf pelaksana atau instansi terhadap masyarakat yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman agar pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik.
2. Ketepatan sasaran merupakan indikator untuk menentukan keberhasilan program, hal ini dapat dinilai atau diukur melalui ketepatan sasaran program dengan peraturan dan kriteria dari sasaran program yang telah ditentukan.
3. Ketepatan waktu merupakan indikator untuk mengukur penggunaan waktu dalam pelaksanaan program, apabila penggunaan waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya, maka

ketepatan waktu dalam pelaksanaan program telah berjalan dengan baik dan efektif.

4. Tercapainya tujuan merupakan indikator untuk mengetahui apakah tujuan dari pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan, hal ini dapat dilihat melalui proses sosialisasi hingga evaluasi terhadap sasaran dan tujuan yang telah disepakati dan ditentukan dalam tahap perencanaan.
5. Perubahan nyata merupakan indikator untuk mengetahui dampak dan perubahan nyata dari pelaksanaan program yang telah dilakukan.

Sedangkan menurut (Budiani, 2009) setidaknya ada empat indikator yang dapat dilakukan dalam mengukur efektivitas program, yaitu sebagai berikut:

1. Ketetapan sasaran program adalah indikator untuk mengukur sejauh mana ketepatan peserta program dengan sasaran program yang telah ditentukan dan ditetapkan sebelumnya.
2. Sosialisasi program adalah indikator untuk mengukur kemampuan dari penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi terkait dengan pelaksanaan program, sehingga informasi dapat tersampaikan secara menyeluruh terhadap masyarakat, khususnya pada masyarakat yang menjadi sasaran program.
3. Pencapaian tujuan program adalah indikator untuk mengukur sejauh mana kesesuaian antara hasil yang telah dicapai dengan tujuan dari program yang telah ditentukan sebelumnya.
4. Pemantauan program indikator untuk mengukur sejauh mana keberhasilan program seperti dapat memberikan dampak positif bagi

peserta program serta apa saja kekurangan dan hambatan dalam pelaksanaan program yang dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan dari program.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan maupun pemberdayaan masyarakat bukanlah istilah yang baru di Indonesia, hal ini dikarenakan angka kemiskinan yang kian meningkat. Pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti kekuatan dan merupakan terjemahan dari istilah *empowerment* dalam bahasa Inggris, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan upaya memberikan kekuatan pada kelompok yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan sehari-hari.

Pemberdayaan masyarakat tidak hanya ditujukan pada individual, namun juga berkelompok, hal ini sebagai bagian dari aktualisasi eksistensi manusia. Hal ini sejalan dengan pandangan (Mardikanto & Soebiato, 2015) menyatakan bahwa pemberdayaan sebagai sebuah proses merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk didalamnya individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.

Menurut (Sumaryadi, 2005) pemberdayaan masyarakat merupakan upaya dalam mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah yang memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu untuk mewujudkan kemajuan, kemandirian serta kesejahteraan untuk suasana keadilan sosial yang berkelanjutan.

Adapun menurut (Chambers, 1995) pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep Pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini juga mencerminkan paradigma baru dalam pembangunan, yakni bersifat *people centered* (berpusat pada manusia), *participatory* (partisipatif), *empowering* (memberdayakan), *sustainable* (berkelanjutan).

Sedangkan menurut (Edi Suharto, 2006) pemberdayaan merujuk pada kemampuan seseorang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:

1. Memenuhi kebutuhan dasar, sehingga dapat memiliki kebebasan (*freedom*), bukan hanya bebas mengemukakan pendapat, tetapi juga bebas dari kelaparan, kebodohan, dan kesakitan.
2. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan, memperoleh barang-barang serta jasa yang dibutuhkan dan berkualitas.
3. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang dapat mempengaruhi mereka.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan masyarakat agar mampu berdiri sendiri dengan keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki untuk mengatasi masalah-masalah mereka sendiri, meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian, mencapai kesejahteraan dan memperbaiki kedudukan dalam masyarakat.

4. Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan salah satu program pemerintah, yaitu Kementerian Sosial Republik Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan. Menurut Kementerian Sosial (2016:6) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan kumpulan atau himpunan dari beberapa masyarakat yang tergolong dalam keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas prakarsanya sendiri, saling berinteraksi satu sama lain, tinggal dalam satu wilayah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dari para anggota, meningkatkan relasi sosial yang harmonis, dapat memenuhi kebutuhan dari para anggota serta dapat

memecahkan masalah sosial yang dialami para anggota dan menjadi wadah untuk mengembangkan usaha bersama.

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) juga merupakan media untuk pemberdayaan sosial yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam pemberdayaan masyarakat miskin, hal ini diharapkan dapat menciptakan aktivitas sosial ekonomi bagi masyarakat miskin agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosial bagi para anggota, mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas dari kelompok masyarakat miskin yang tergabung dalam Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Hal ini juga sejalan dengan Kementerian Sosial yang menyatakan bahwa tujuan dari adanya program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan dari masing-masing anggota yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE), sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya pendapatan dari keluarga miskin, kualitas sandang, pangan, papan, tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan serta meningkatnya kebutuhan sosial lainnya.
2. Meningkatkan kemampuan dari masing-masing anggota yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE), sehingga dapat menyelesaikan atau mengatasi permasalahan yang terjadi dalam keluarga maupun yang terjadi dalam lingkungan tempat tinggal seperti adanya perbedaan pendapat, baik didalam ataupun diluar keluarga, hal ini untuk meminimalisir perselisihan yang mungkin saja terjadi antar sesama anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
3. Meningkatkan kemampuan dari masing-masing anggota dalam menampilkan peranan-peranan sosialnya, hal ini dapat dilihat dengan semakin meningkatnya kepedulian, rasa tanggung jawab dan keikutsertaan anggota dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dilingkungannya serta semakin terbukanya

pilihan untuk para anggota kelompok dalam mengembangkan usaha yang lebih menguntungkan dan terbukanya kesempatan untuk memanfaatkan sumber dan potensi kesejahteraan sosial yang tersedia dalam lingkungannya.

Berdasarkan penjabaran diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah untuk meningkatkan motivasi dan kerjasama dalam kelompok, menghapus kemiskinan, meningkatkan kemampuan para anggota dalam memenuhi kebutuhan hidup dan memberikan jalan kepada para anggota untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik didalam keluarga maupun lingkungannya.

Agar pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, maka Kementerian Sosial memiliki kriteria penerima bantuan dari program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ini, berikut adalah kriteria calon penerima bantuan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) menurut Kementerian Sosial:

1. Termasuk dalam Rumah Tangga Miskin yang terdaftar di Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DTPFMOTM), hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 146/HUK/2013 Tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
2. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)
3. Telah menikah dan berusia mulai dari 18 tahun sampai dengan 60 tahun serta masih produktif
4. Belum pernah mendapat bantuan KUBE
5. Beranggotakan 5 hingga 20 orang dalam satu kelompok dengan tempat tinggal yang berdekatan dan berdomisili tetap
6. Memiliki potensi dan keterampilan

7. Mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten atau Kota setempat

